

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andrew Karmen, 2016, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Ninth Edition, Cengage Learning, Boston.
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktik*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- D. L. Rothe, D. Kauzlarich, 2014, *Toward Victimology of State Crime*, Ebook, Routledge, New York.
- D. M. A. Mansur, dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- D. Y. Witanto dan A. P. N. Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilana Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.
- Desyana *et al*, 2022, *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), Jakarta.
- E.A. Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Eddy Djunaedi, Wildan Suyuthi, 2000, *Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI.
- Hartiwiningsih, *et al*, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Modul 1 HKUM4306, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

- I K. Sudira, 2019, *Hak Reparasi Saksi dan Korban dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana dari Perspektif Viktimologi*, UII Press, Yogyakarta.
- James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, New York.
- Lilik Mulyadi, 1980. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Y. Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cetakan Ketujuh Belas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, editor, Aep Gunarsa. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- P. M. Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-17, Kencana, Jakarta.
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, *Kedudukan Dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian*, Bogor.
- S. S. Brown, dan V. A. Willison. 1985, *Restitution: A Historical and Legal Review*, New York State Division of Criminal Justice Sevices (NCJRS), New York.
- Setiono, 2005, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata*, edisi ke 7, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- Sunarto, 2021, *Batasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Suteki. Galang Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Ed. 1, Cet. 4, Rajawali Pers, Depok.
- T.J. Gunawan, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Cet. Ke-1 Ed Revisi, Kencana, Jakarta.
- T. S. Langkun *et al*, 2014 *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Policy Paper*, ICW, Jakarta.
- Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia Sebuah Kajian Awal*, ICW, ICJR dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.
- Wahyu Wagiman, *et. al*, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi, serta Bantuan bagi Saksi dan Korban, Usulan Inisiatif Masyarakat*, ICW, ICJR dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan & Putusan**

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537.

Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Atambua, *Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Atb*, Belu.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/ PN.Jkt.Sel*, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Marabahan, *Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 217/Pid.Sus/2022/PN Mrh*, Barito Kuala.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Menggala, *Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Mgl*, Tulang Bawang.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Kuningan, *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Kng*, Kuningan.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Atambua, *Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb*, Belu.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Bantaeng, *Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Ban*, Bantaeng

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Labuha, *Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Lbh*, Halmahera Selatan

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Tuban, *Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Tbn*, Tuban.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Mentok, *Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mtk*, Bangka Barat.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Kota Agung, *Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Kot*, Tanggamus.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Pontianak, *Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Ptk*, Pontianak.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Pontianak, *Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Ptk*, Pontianak.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Depok, *Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Dpk*, Depok.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri 230/Pid.Sus/2022/PN Gpr*, Kabupaten Kediri.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gpr*, Kabupaten Kediri.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Sleman, *Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Smn*, Sleman.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Manado, *Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Mnd*, Manado.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Menggala, *Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mgl*, Tulang Bawang.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Menggala, *Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Mgl*, Tulang Bawang.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Sleman, *Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Smn*, Sleman.

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Sleman, *Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 430/Pid.Sus/2023/PN Smn*, Sleman

### **C. Jurnal, Tesis & Disertasi**

A. A. Absar, 2020 “Restorative Justice in Islam with Special Reference to the Concept of Diyya” *Journal of Victimology and Victim Justice* 3(1)

A.E. Subiyanto, 2012 “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945” *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4.

Ahmad Bahiej, 2005 “Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat” *Asy-Syi’rah*, Vol. 39 No. I.

Ali Masyar, 2023 “Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform”, *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 4 Issue 1.

Angkasa, 2023, “Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia” *Journal of Indonesian Legal Studies*, Volume 8 Issue 1

Arifyansyah Nur, *et al*, 2021 “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus” *Jurnal Lex Generalis (JLS)* Volume 2, Nomor 7.

Ateng Sudiby, Aji Halim Rahman, 2021, “Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana” *Presumption of Law*, Volume 3 Nomor 1.

A. Y. Sulistyawan, A. F. P. Atmaja, 2021, “Arti Penting Legal Reasoning bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd” *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2

Bambang Purnomo, “Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia” dalam Beni Puspito.

- Bambang Sutiyoso, 2010, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan” *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17.
- Dwi Hananta, 2018, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1
- E. N. Butarbutar, 2012, “Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum” *Yustisia* Vol.1 No.1
- F. F. Adonara, 2015 “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2
- F. T. Wahyuono, 2023, “Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Hukum Acara Pidana,” *Tesis*, Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fitriana Murniati, 2007, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi dalam Bidang Kesehatan di Indonesia” *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- I K. Sudiarsana, 2023, “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kerangka Keadilan Restoratif,” *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- M. A. Syahrin, 2018, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu” *Majalah Hukum Nasional* No. 1.
- M. M. Ross, 2006 “A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal” *Journal of the Association of Legal Writing Directors*, Vol. 3.
- Mahrus Ali, Ari Wibowo, 2018, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana” *Yuridika*: Volume 33 No. 2.
- Marasabessy, 2016 “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-45 No. 1.
- Muchamad Iksan *et al*, 2023, “Fulfilling the Restitution Rights of Crime Victims: The Legal Practice in Indonesia,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 12 No 4.
- P. M. Hadjon, 1994, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)” No. 6 Tahun IX, *Yuridika*.

Peter Guntara, 2023, “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan,” *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prayogo Kurnia, et al, 2015 “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban” GEMA, Tahun XXVII/49.

S. H. Pillsbury, 1989, “Understanding Penal Reform: The Dynamic of Change” *Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 80, No. 3.

Siniša Franjić, 2019, “Child Victims” *Clinical Research in Psychology*, Vol 2, Issue 1.

T.P Moliono, Widati Wulandari “Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritis terhadap Putusan MK tentang Praperadilan” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 22.

#### **D. Internet**

Eva Achjani Zulfa, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” dalam [http://bphn.go.id/data/documents/lampiran\\_makalah\\_dr\\_eva\\_achjani\\_sh\\_mh.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/lampiran_makalah_dr_eva_achjani_sh_mh.pdf) diakses pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 pukul 09.05 WITA.

ICJR, “Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum” selengkapnya terdapat dalam <https://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/> Diakses pada tanggal 07 Februari 2024 Pukul 13.20 WIB.

Hukumonline “Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi” selengkapnya terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/> Diakses pada tanggal 07 Februari 2024 Pukul 20.12 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, “Ideal” terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ideal>

Keterangan Riki Perdana Raya Waruwu, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI selengkapnya terdapat dalam JDIH Mahkamah Agung “Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung” dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>

Khairul Ikram, “Perluasan Asas Legalitas Formil ke Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Nasional: Kontroversi serta Eksistensinya” selengkapnya terdapat dalam <https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitas-formil-ke-asas-legalitas-materiil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/>

Tirto, “Konsekuensi Mario Dandy bila Tak Bisa Bayar Restitusi bagi David” selengkapnya terdapat dalam <https://tirto.id/konsekuensi-mario-dandy-bila-tak-bisa-bayar-restitusi-bagi-david-gPmR> Diakses pada tanggal 07 Februari 2024 Pukul 14.23 WIB.

UNICEF Indonesia, “#SetiapAnakBerhak, Hak Untuk Setiap Anak” selengkapnya terdapat dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak> Diakses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 04.05 WIB.

ICJR, “Peradilan Pidana di 2018: Di bawah Bayang-Bayang Overkriminalisasi” selengkapnya terdapat dalam <https://icjr.or.id/peradilan-pidana-di-2018-di-bawah-bayang-bayang-overkriminalisasi/> Diakses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 19.20 WIB

Shidarta, Petrus Lakonawa, “Res Iudicata Pro Veritate Habetur: Makna Dan Penggunaannya” terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/>

Supandriyo, “Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum khusus” terdapat dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/16313-mengkaji-asas-kebebasan-hakim-dalam-penjatuhan-pidana-dengan-ancaman-minimum-khusus/> Diakses pada tanggal 18 Mei 2024 Pukul 23.09 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring “Korban” selengkapnya terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban> Diakses pada tanggal 16 Juni 2024 Pukul 21.12 WIB